



KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI

PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kajian Investasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera
Skema Riset : Kerja Sama Penelitian Swakelola
Koordinator Peneliti :
a. Nama : Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA
b. NIP/NIDN : 196412311994121001/0031126459
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomor HP : +6281351533007
f. Anggota Peneliti :

No	Nama	NIP/NIDN	Program Studi	Bidang Keahlian
1	Dr. M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si	197005181997021001	Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ahli Ekonomi Wilayah
2	Dr. Rahma Yuliani, SE, M.Si., Ak., CA	197707032003122012	Akuntansi	Akuntansi
3	Doni Stiadi, S.Si, M.Si	197607132006041001	Manajemen	Manajemen
4	Mellani Yulastina, SE., M.Ak., Ak., CA	198808012022032000	Akuntansi	Administrasi/ Operator

Anggaran : Rp.75.000.000,00
Sumber Anggaran : Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2022

Banjarmasin, 12 Desember 2022

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Koordinator Peneliti,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA
NIP. 196412311994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup Kajian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pembangunan Nasional	6
2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan, BPR	8
2.3. Kategori UMKM	10
2.4. Analisis SWOT	10
2.5. Investasi	13
2.6. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis.....	14
BAB 3. METODE PENELITIAN	25
3.1. Desain dan Kerangka Kajian.....	25
3.1.1. Desain Kajian	25
3.1.2. Kerangka Kajian	25
3.1.3. Lokasi Kajian	26
3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data.....	27
3.2. Teknik Analisis Data	27

3.2.1. Analisis Non Keuangan	27
3.2.2. Analisis Keuangan.....	29
3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian	31
BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah.....	32
4.2. Gambaran Umum Makro Ekonomi Daerah	34
4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	34
4.2.2. Struktur Ekonomi.....	37
4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	39
4.2.4. Pendapatan Perkapita.....	40
4.2.5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan	41
4.2.6. Pengangguran dan Kemiskinan.....	44
4.3.3. Aspek Penyertaan Modal	66
4.3.3.1. Jenis Penyertaan Modal	66
4.3.3.2. Posisi Modal dan Skema Penyertaan Modal	67
4.3.4.2. Produk dan Jenis layanan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	72
4.3.4.3. Persaingan Usaha	75
4.3.4.4. Peluang/Potensi Pasar PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera.....	78
4.4. Analisis Keuangan.....	84
4.1. Kesimpulan.....	90
4.2. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks SWOT.....	12
Tabel 2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Balangan tahun 2021.....	33
Tabel 3. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan	34
Tabel 4. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2021	35
Tabel 5. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021	36
Tabel 6. Share Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2021	37
Tabel 7. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2021	38
Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan.....	39
Tabel 9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2021.....	41
Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan.....	42
Tabel 11. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	43
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan	44
Tabel 13. Faktor Internal dan Eksternal	46
Tabel 14. Pembobotan SWOT.....	48
Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah	57
Tabel 16. Produk dan Aset Keuangan PT. BPR Sanggam Citra Sejahtera ..	71
Tabel 17. Jumlah UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020.....	80
Tabel 18. Distribusi dan Klasifikasi UMKM di Kabupaten Balangan Tahun 2020.....	81
Tabel 19. Jenis UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2020	81
Tabel 20. Rencana Penyaluran Kredit dan Penempatan Lainnya	84
Tabel 21. Realisasi Cash Flow dan Laba.....	85
Tabel 22. Proyeksi Cash Flow dan Laba	85
Tabel 23. Net Present Value (NPV)	86
Tabel 24. <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (BCR) Karet.....	87
Tabel 25. <i>Internal Rate of Return</i> (IRR) Karet.....	88
Tabel 26. <i>Discounted Payback Period</i> Karet.....	88
Tabel 27. Analisis Rasio Keuangan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi BPR	26
Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan.....	33
Gambar 3. Peta Kekuatan Organisasi.....	51
Gambar 4. Skema Penyertaan Modal Pemda Kab. Balangan	69
Gambar 5. Grafik jumlah penduduk dan persentase Kabupaten Balangan pada setiap Kecamatan	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Pelaksana Kajian.....	94
--	----

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Balangan secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi geografis Kabupaten Balangan berada di lokasi yang dekat dengan calon ibukota negara, adalah potensi strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Kabupaten Balangan memiliki 8 Kecamatan 154 desa dan 3 kelurahan dengan luas 1.828,1225 km² dan jumlah penduduk 130.355 jiwa (BPS, Tahun 2021). Peningkatan roda pembangunan telah berjalan dan dapat dikatakan sukses dengan terciptanya iklim usaha yang baik. Perkembangan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh penanaman modal yang telah dilakukan berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman modal merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam pelaksanaan penanaman modal dibutuhkan pengendalian dan pengawasan, agar pelaksanaannya dapat terwujud dan dilaksanakan diperlukan kepatuhan para investor terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal yang meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi bukan sekedar setor modal, kemudian menunggu hasilnya, namun perlu dilakukan perencanaan yang matang melalui analisis

kelayakan investasi untuk mengetahui prospek dari investasi yang mendasari keputusan investasi tersebut menguntungkan atau tidak.

Lembaga perbankan merupakan salah satu variabel kunci sebagai lembaga perantara atau intermediasor untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu lembaga perbankan yang identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah, karena itu lebih banyak ditemui di kabupaten hingga pelosok kecamatan.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan dan bentuk lainnya, b) memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, d) menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito atau jenis tabungan lain. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah a) Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, b) Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, c) Mempercepat pembangunan di desa, d) menyediakan layanan perbankan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat pada Tanggal 2 Juli 2012 yang berubah nama menjadi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera melalui Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031219.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera. Perubahan tersebut diharapkan agar lebih berkembang secara profesional sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu memberikan tambahan penyertaan modal untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan bank tersebut. Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 23 ayat 1 bahwa penyertaan modal dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk a) pengembangan usaha,

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Nasional

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation buildings*). Ginanjar Kertasasmita mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Pembangunan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. (Rustiadi, 2011). Pembangunan bertalian dengan konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan. United Nations of Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choice*). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the 16 ultimate end*), bukan alat, cara, atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat dari formasi modal manusia (*human capital formation*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan nasional sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang berdimensi banyak dan dapat

didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, pembangunan hukum, administrasi pembangunan dan sebagainya. Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. Substansi permasalahan yang berbeda antara satu masalah dengan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor yang dimaksud. Adapun faktor-faktor pendukung program pembangunan daerah antara lain meliputi: a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya c. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan pendanaan d. Koordinasi yang baik e. Top down dan bottom up planning f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus g. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan, BPR

Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta.

Jenis-jenis Bank Menurut (Kasmir, 2014) dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah 10 (sepuluh) operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya dalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain dan Kerangka Kajian

3.1.1. Desain Kajian

Kajian Investasi PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera Kabupaten Balangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik pendekatan kualitatif berdasarkan Cresswell (2007), yaitu natural setting, researcher as key instrumen, multiple sources of data, inductive data analysis, participants, emergent design, theoretical lens, interpretive inquiry, holistic account. Setiap rancangan penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri tergantung pada 3 (tiga) kondisi, yaitu: tipe dari pertanyaan penelitian, kontrol dari investigator atas perilaku kejadian, fokus pada isu kontemporer sebagai sejarah fenomena (Yin, 2003, 2011)

Menurut Yin (2003, 2011) studi kasus merupakan salah satu dari rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu aktivitas, proses atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus cocok untuk kajian ini yang menganalisis sebuah program, peristiwa, aktivitas dan proses terkait

3.1.2. Kerangka Kajian

Kajian Investasi BPR di Kabupaten Balangan sangat penting untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Balangan telah memiliki wadah yang cukup strategis dalam bentuk perseroan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera. Pendirian PT.BPR Sanggam Cipta Sejahtera tersebut sesuai

dengan visi dan misi Pemda Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kerangka pikir kajian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi BPR

3.1.3. Lokasi Kajian

Lokasi kegiatan penyusunan kajian analisis intestasi PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah di Kabupaten Balangan.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Keadaan Wilayah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Paringin sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara astronomis Kabupaten Balangan terletak di antara $2^{\circ}1'37''$ sampai dengan $2^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan di antara $114^{\circ}50'24''$ sampai dengan $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur, dengan posisi geografisnya berbatasan dengan:

1. Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah utara;
2. Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah timur;
3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah selatan; dan
4. Hulu Sungai Utara di sebelah barat.

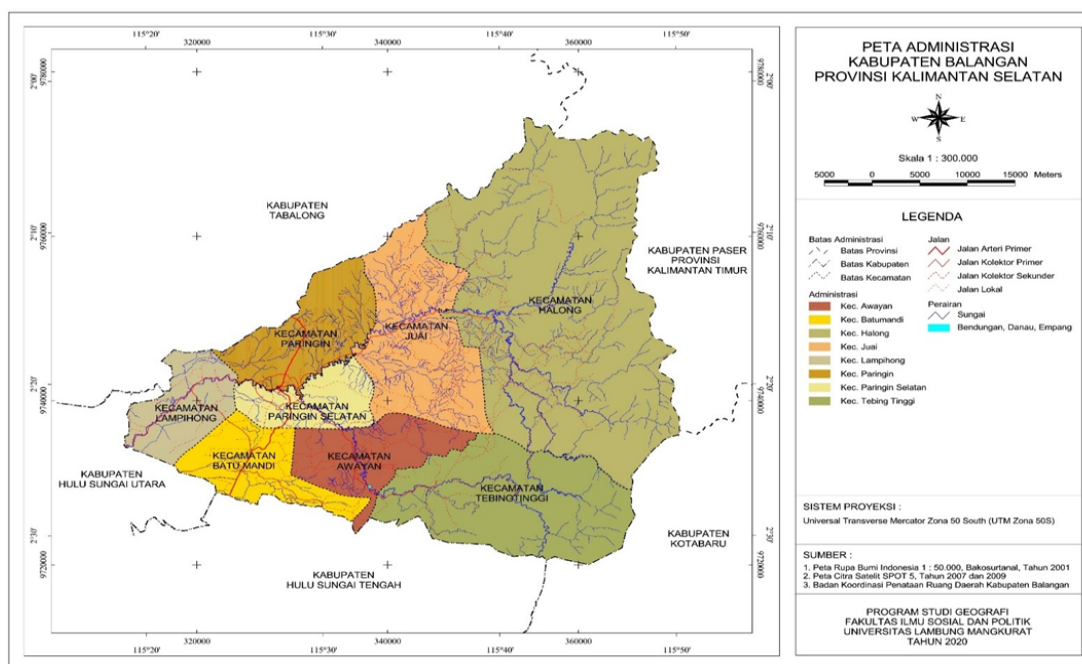
Luas wilayah Kabupaten Balangan mencapai 1.828,1225 km², terbesar berupa dataran dan pegunungan, dengan jumlah penduduk menurut hasil proyeksi pada tahun 2021 sebanyak 132.213 jiwa (66.821 laki-laki dan 65.392 perempuan) yang tersebar di 8 kecamatan dan 157 desa/kelurahan (154 desa dan 3 kelurahan). Kecamatan Halong memiliki luas wilayah terbesar, yakni 35,13 persen dari luas Kabupaten Balangan dengan jumlah penduduk terbanyak 20.608 jiwa, sedangkan luas wilayah terkecil dimiliki Kecamatan Paringin Selatan (4,62%) dengan jumlah penduduk 15.914 Jiwa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021

Kecamatan	Desa (Jml)	Luas (KM ²)	%
1. Lampihong	27	96,96	5,16
2. Batumandi	18	147,96	7,88
3. Awayan	23	142,57	7,59
4. Tebing Tinggi	12	257,25	13,69
5. Paringi	16	100,04	5,33
6. Paringin Selatan	16	86,80	4,62
7. Juai	21	386,88	20,60
8. Halong	24	659,84	35,13
Kab. Balangan	157	1.828,1225	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2022

Peta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan

Kepadatan Penduduk Kabupaten Balangan, sebagaimana Tabel 3 telah meningkat dari 69,40 di tahun 2020 menjadi 72,32 di tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,90 persen. Selama 10 tahun terakhir (2010-2020) Penduduk tumbuh rata-rata 1,41 persen dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan Paringin Selatan (2,92%), Kecamatan Tebing Tinggi (1,69%) Kecamatan Batu Mandi (1,52%), Kecamatan paringin (1,49%), dan Kecamatan Lampihong (1,52%).

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyana, R., Amalia, R., Salsabilah, D. S., Uka, A. S., Rilisa, C., & Gunawan, W. (2020). Strategy for increasing lowland rice productivity in West Java Province with the SWOT-AHP Model Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 457(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/457/1/012058>
- Cresswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, second ed., John W. Cresswell. In *Australasian Emergency Nursing Journal* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2008.02.005>
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 363–382. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V5I2.3019>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja GrafindoPersada.
- Kasmir, & Jakfar. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenadamedia Group.
- Malihah, L., Yulian Ma, M., Adi Riswan Al Mubarak, M., Amalia Institut Agama Islam Darussalam, R., & Selatan, K. (2021). Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E-Money Syariah) oleh Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Sekitar Lingkungan Kampus IAI Darussalam Martapura). In *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* (Vol. 1, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=UHV8Z2SE57EC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Riyadi, & Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Multigrafika.
- Rustiadi, E. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.